



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021 Kabupaten Banjarnegara. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi wajib bagi pemerintah daerah untuk selalu mengukur setiap capaian pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Penyusunan Laporan Capaian SPM ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banjarnegara selalu berusaha untuk mengembangkan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Capaian SPM Tahun 2021 Kabupaten Banjarnegara ini disusun selain untuk mengukur dan menilai kinerja Perangkat Daerah juga untuk menyempurnakan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas 6 urusan dasar yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat serta Sosial. Maka laporan ini juga menyajikan perkembangan penerapan dan pencapaian SPM yang mencakup 6 urusan wajib tersebut.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah mengumpulkan data capaian hasil penerapan SPM tahun 2021 dengan memberikan analisa

pada indikator-indikator yang belum dapat terpenuhi 100%, serta membuat kesimpulan dan usul saran yang berguna untuk penyusunan laporan pencapaian penerapan SPM di tahun selanjutnya. Untuk itu, kami sampaikan terimakasih kepada seluruh pihak-pihak yang ikut membantu dalam penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih memiliki kekurangan sehingga kami berharap agar seluruh pihak terkait berkenan memberikan informasi serta kritik saran dan masukan untuk perbaikan yang pada akhirnya dapat mewujudkan tujuan reformasi birokrasi yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjarnegara.

Banjarnegara, Maret 2022

Plh. BUPATI BANJARNEGARA,
WAKIL BUPATI

SYAMSUDIN, S.Pd., M.Pd

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	3
C. KEBIJAKAN UMUM.....	5
D. ARAH KEBIJAKAN.....	7
BAB II : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	
A. URUSAN PENDIDIKAN.....	9
B. URUSAN KESEHATAN	13
C. URUSAN PEKERJAAN UMUM.....	27
D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN.....	31
E. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	36
F. URUSAN SOSIAL	43
BAB III : PROGRAM DAN KEGIATAN.....	50
BAB IV : PENUTUP.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang- undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandardkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan : (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah. Terhadap belanja Daerah maka

ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Atas perubahan paradigma yang telah disebutkan diatas, maka penerapan SPM di Kabupaten Banjarnegara dalam tahap penyesuaian. Secara umum muatan Laporan

Penerapan SPM ini mencakup kebijakan umum, arah kebijakan, penerapan dan pencapaian SPM serta program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan SPM terhadap warga negara penerima layanan dasar dalam hal ini yaitu warga negara Indonesia yang tercatat sebagai warga Kabupaten Banjarnegara.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penerapan SPM di Kabupaten Banjarnegara, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687).

- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- 13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 17 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 58).

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD. Prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 disusun melalui beberapa pendekatan, meliputi politis, teknokratis, partisipatif, dan *top down-bottom up*. Berpedoman pada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 31 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara, Tema

BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN BERSEJAHTERA

Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 adalah “*Pengembangan Infrastruktur Jalan*”. Fokus prioritas pada program dan kegiatan yang berdampak pada peningkatan kompetensi dan daya kompetisi pelaku usaha, infrastruktur penunjang aktivitas perekonomian, dan kebijakan kabupaten yang berdampak perluasan jangkauan pemasaran citra industri jasa dan budaya Kabupaten Banjarnegara. Selain itu, prioritas pendukung diletakkan pada program dan kegiatan yang berdampak meningkatkan kecukupan dan kualitas layanan dasar pendidikan, kesehatan, pemukiman, dan koponen penguat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berkeadilan. Dalam rangka siaga tahun politik (pemilu serentak) program dan kegiatan yang berdampak pada penguatan kesiagaan masyarakat untuk meningkatkan kondusivitas kota juga menjadi prioritas. Oleh karena itu, arah kebijakan terkait pencapaian SPM yang mendasari rencana kerja pembangunan Kabupaten Banjarnegara dan diterjemahkan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangan urusannya adalah:

BIDANG	ARAH KEBIJAKAN
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan b. Membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkarakter unggul c. Pengembangan kreatifitas pemuda
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> d. Pembiasaan Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat e. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan
Pekerjaan Umum	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur memenuhi <i>Universal Access</i>

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan tata kelola lingkungan sehat
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan kondusivitas keamanan, ketertiban, kenyamanan kota
Sosial	Percepatan pengentasan masyarakat miskin dan pengangguran

Adapun prioritas pembangunan tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Penguatan komponen reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berkeadilan
- b. Peningkatan kompetensi dan daya kompetisi pelaku usaha
- c. Penguatan kebijakan kabupaten yang berdampak pada perluasan jaringan pemasaran citra industri jasa dan budaya Kabupaten Banjarnegara
- d. Penguatan layanan dasar pangan, pendidikan, kesehatan dan permukiman
- e. Peningkatan infrastruktur penunjang aktivitas perekonomian
- f. Peningkatan kondusivitas kabupaten dan tata kelola lingkungan hidup

D. ARAH KEBIJAKAN

Berpedoman pada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021, tema pembangunan Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 adalah “Pengembangan Daya Saing Kabupaten Didukung Kemandirian Masyarakat Berbasis Kearifan Budaya”

Kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga melalui penerapan dan pencapaian SPM diterjemahkan dalam arah kebijakan yang mendasari rencana kerja pembangunan Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

Tabel 1.2
Arah Kebijakan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021
Dalam Rangka Penerapan dan Pencapaian SPM

BIDANG	ARAH KEBIJAKAN
Pendidikan	a. Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan b. Membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkarakter unggul
Kesehatan	a. Pembiasaan Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan
Pekerjaan Umum	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur memenuhi <i>Universal Access</i>
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan tata kelola lingkungan sehat
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	a. Peningkatan kondusivitas keamanan, ketertiban, kenyamanan kota b. Pengendalian kawasan rawan bencana
Sosial	Percepatan pengentasan masyarakat miskin dan pengangguran

Dokumen RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 menjadi dasar dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah di tahun berkenaan. Dalam tahapan penyusunan Rancangan APBD dan APBD diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dimana dalam penyusunannya menggunakan asumsi-asumsi dasar yang diantaranya berorientasi pada pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat melalui penerapan SPM.

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Mendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta telah membentuk Tim Penerapan SPM dengan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 130/41 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 131/01 Tahun 2022 Selaku Ketua Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal tentang penetapan Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Berikut adalah laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021:

A. BIDANG PENDIDIKAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar untuk SPM bidang Pendidikan antara lain :

- a. **Pendidikan Dasar**, dengan indikator pencapaian yakni Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs), dan rumus perhitungan kinerja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Anak Usia 7-15 Tahun yang sudah tamat/sedang belajar di satuan Pendidikan Dasar}}{\text{Anak Usia 7-15 Tahun}} \times 100\%$$

- b. **Pendidikan Kesetaraan**, dengan indikator pencapaian yakni Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, dan rumus perhitungan kinerja sebagai berikut:

$$\frac{\text{Anak Usia 7-18 Tahun yang sudah tamat/sedang belajar di satuan Pendidikan Kesetaraan}}{\text{Anak Usia 7-18 Tahun}} \times 100\%$$

- c. **Pendidikan Anak Usia Dini**, dengan indikator pencapaian yakni Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, dan rumus perhitungan kinerja sebagai berikut:

$$\frac{\text{Anak Usia 5-6 Tahun yang sudah tamat/sedang belajar di satuan Pendidikan Kesetaraan}}{\text{Anak Usia 5-6 Tahun}} \times 100\%$$

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang Pendidikan yaitu 100% terhadap warga negara yang seharusnya mendapat pelayanan untuk setiap jenis pelayanan dasar, antara lain : 1) Pendidikan Dasar; 2) Pendidikan Kesetaraan; maupun 3) Pendidikan Anak Usia Dini.

Adapun jumlah warga negara yang seharusnya memperoleh pelayanan dasar bidang Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Target Warga Negara yang Mendapat Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target Warga Negara yang Seharusnya Mendapat Pelayanan Dasar	
		Kualifikasi	Jumlah (Orang)
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun	149.848
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun	2.754
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun	33.477

3. Realisasi

Tabel 2.2

Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Pembilang	Penyebut	Capaian Kinerja (%)
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	138.977	149.848	92,74%
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	1.348	2.754	49%
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.	36.901	49.308	74,83

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar Pendidikan Dasar pada Tahun 2021 dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Keberhasilan secara akademik dengan adanya kejuaraan lomba yang dari tahun ke tahun meningkat
2. Jumlah sekolah yang mengikuti ANBK (Asasmen Nasional Berbasis Komputer) SD maupun SMP 100%.
3. Semakin terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana baik SD maupun SMP serta proses PPDB secara zonasi semakin dimengerti oleh masyarakat.

Sementara capaian kinerja jenis pelayanan dasar Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 sebagai hasil dari penjangkauan ATS (Anak Tidak Sekolah).

Namun demikian pada jenis pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini capaian kinerja Tahun 2021 mengalami penurunan disebabkan karena dampak dari covid-19 banyak orangtua yang masih khawatir untuk mendaftarkan anaknya sekolah ke jenjang PAUD.

4. Program dan Alokasi Anggaran

Total alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 yang dalam rangka mendukung penerapan SPM bidang Pendidikan yakni sebesar Rp. 171.512912.421,00 terdiri dari :

- a. Belanja Operasi sebesar Rp. 76.893.206.998,00
- b. Belanja BOS sebesar Rp. 94.619.705.423,00 dengan rincian alokasi anggaran per jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

**Tabel 2.3
Program dan Alokasi Anggaran
Penerapan SPM Bidang Pendidikan**

Jenis Pelayanan Dasar	Program	Anggaran	
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendidikan Dasar		150.367.024.621,-	146.825.435.569,-
	Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	150.367.024.621,-	146.825.435.569,-
Pendidikan Kesetaraan		3.967.332.500,-	3.926.919.340,-
	Program Pendidikan Non Formal	3.967.332.500,-	3.926.919.340,-
Pendidikan Anak Usia Dini		17.178.555.300,-	16.428.564.500,-

Jenis Pelayanan Dasar	Program	Anggaran	
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	17.178.555.300,-	16.428.564.500,-
	TOTAL	171.512.912.421,-	167.180.919.409,-

5. Dukungan Personil

Perangkat daerah pelaksana SPM bidang pendidikan di Kabupaten Banjarnegara yaitu Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara mengkoordinasikan 98 Sekolah Menengah Pertama, 20 (dua puluh) Unit Pelaksana Teknis Dinas serta 20 Koordinator Wilayah Kecamatan dengan dukungan personil sebagai berikut:

Tabel 2.4
Dukungan Personil
Penerapan SPM Bidang Pendidikan

Nama Perangkat Daerah	JFT	JFU	Struktural	Jumlah
Dinas Pendidikan	4.527	270	20	4.817

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terjadi dalam rangka penerapan SPM bidang pendidikan di Kabupaten Banjarnegara yaitu adanya kesulitan dalam mendata anak putus sekolah dan anak tidak bersekolah di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Solusi yang akan dilaksanakan yakni dengan melaksanakan penelusuran di tingkat wilayah berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

B. BIDANG KESEHATAN

Pelaksanaan SPM bidang Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Secara garis besar capaian kinerja SPM bidang Kesehatan di Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut :

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar untuk SPM bidang Kesehatan antara lain :

- a. **Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**, dengan indikator pencapaian yakni Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan, dan rumus perhitungan kinerja sebagai berikut :

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta

$\frac{\text{Jumlah semua ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2021}}{\text{Jumlah semua ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta}} \times 100\%$

- b. **Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**, dengan indikator pencapaian yakni Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan, dan rumus perhitungan kinerja sebagai berikut :

Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan

$\frac{\text{Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah Kota Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2021}}{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan}} \times 100\%$

- c. **Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**, dengan indikator pencapaian yakni Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan, dan rumus perhitungan kinerja sebagai berikut:

Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar

$\frac{\text{Jumlah semua bayi baru lahir di Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2021}}{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar}} \times 100\%$

- d. **Pelayanan Kesehatan Balita**, dengan indikator pencapaian yakni Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan, dan rumus perhitungan kinerja sebagai berikut :

Jumlah balita usia 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar

$\frac{\text{Jumlah semua balita 0-59 bulan di Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2021}}{\text{Jumlah balita usia 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar}} \times 100\%$

- e. **Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar**, dengan indikator pencapaian yakni Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan, dan rumus perhitungan kinerja sebagai berikut :

Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar

Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2021 $\times 100\%$

- f. **Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif**, dengan indikator pencapaian yakni Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan, dan rumus perhitungan kinerja sebagai berikut :

Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat

pelayanan skrining kesehatan sesuai standar

Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di $\times 100\%$

Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2021

- g. **Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut**, dengan indikator pencapaian yakni Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan, dan rumus perhitungan kinerja sebagai berikut :

Jumlah pengunjung berusia 60 tahun keatas yang

mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal

1 kali dalam kurun waktu satu tahun

Jumlah semua penduduk berusia 60 tahun keatas $\times 100\%$

yang ada di Kabupaten Banjarnegara pada

Tahun 2021

- h. **Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**, dengan indikator pencapaian yakni Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan, dan rumus perhitungan kinerja sebagai berikut :

Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2021 $\times 100\%$

- i. **Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)**, dengan indikator pencapaian yakni Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan, dan rumus perhitungan kinerja sebagai berikut :

Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2021 $\times 100\%$

- j. **Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**, dengan indikator pencapaian yakni Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan, dan rumus perhitungan kinerja sebagai berikut :

Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar

Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2021 $\times 100\%$

- k. **Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)**, dengan indikator pencapaian yakni Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan, dan rumus perhitungan kinerja sebagai berikut :

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2021 $\times 100\%$

- I. **Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV**, dengan indikator pencapaian yakni Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan, dan rumus perhitungan kinerja sebagai berikut :

Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2021 $\times 100\%$

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang Kesehatan yaitu 100% untuk setiap jenis pelayanan dasar. Adapun jumlah warga negara yang seharusnya memperoleh pelayanan dasar bidang Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Target Warga Negara yang Mendapat Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target Warga Negara yang Seharusnya Mendapat Pelayanan Dasar	
		Kualifikasi	Jumlah (Orang)
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang seharusnya mendapatkan layanan kesehatan	15.721
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang seharusnya mendapatkan layanan kesehatan	14.338
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang seharusnya mendapatkan layanan kesehatan	14.283
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	73.965
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang seharusnya mendapatkan layanan kesehatan	134.912

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target Warga Negara yang Seharusnya Mendapat Pelayanan Dasar	
		Kualifikasi	Jumlah (Orang)
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang seharusnya mendapatkan layanan kesehatan	672.323
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang seharusnya mendapatkan layanan kesehatan	140.709
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang seharusnya mendapatkan layanan kesehatan	325.625
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang seharusnya mendapatkan layanan kesehatan	15.765
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang seharusnya terlayani kesehatan	2.997
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang seharusnya mendapatkan layanan kesehatan	9.994
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang seharusnya mendapatkan layanan kesehatan	17.584

3. Realisasi

Tabel 2.6
Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Pembilang	Penyebut	Capaian Kinerja (%)
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	13.679	15.721	87,0
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	14.011	14.338	97,7
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	14.158	14.283	99,1
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	68.114	73.965	92,1
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	75.892	134.912	56,3
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	208.693	672.323	31,0
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	69.091	140.709	49,1
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	114.648	325.625	35,2
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus	15.765	15.765	100,0

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Pembilang	Penyebut	Capaian Kinerja (%)
	diabetes melitus	yang mendapatkan layanan kesehatan			
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	1.955	2.997	65,2
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	5.188	9.994	51,9
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	16.924	17.584	96,2

Capaian kinerja bidang Kesehatan Tahun 2021 hanya ada satu jenis pelayanan dasar yang mencapai target SPM 100 % dapat dilaksanakan dengan optimal dan mengalami peningkatan dengan faktor pendorong sebagai berikut:

1. Pelayanan penderita diabetes melitus, didorong oleh faktor-faktor antara lain:
 - a. Sarana dan prasarana yang memadai
 - b. Adanya pertemuan rutin pelaksana program PTM
 - c. Pelaksanaan Program Prolanis dan Posbindu di semua puskesmas
 - d. Pertemuan lintas sektor dan pembinaan jejaring puskesmas

Sementara capaian kinerja pelayanan dasar yang belum optimal mencapai target SPM 100% adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil baru mencapai 87%, dikarenakan hal-hal berikut:
 - a. Domisili ibu hamil tidak di wilayah Kabupaten Banjarnegara sehingga masa kehamilan kurang bisa terpantau.
 - b. Belum optimalnya koordinasi dengan Rumah Sakit/ Bidan Praktek Mandiri/ Klinik yang melakukan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil.
2. Pelayanan kesehatan ibu melahirkan baru mencapai 97,7%, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Masih terdapat ibu melahirkan dengan dukun sebanyak 12 kasus
 - b. Masih terdapat persalinan dengan tenaga kesehatan di Praktek Mandiri Bidan (PMB) yang tidak standar, persalinan di rumah pasien, dan dalam mobil saat melakukan rujukan
 - c. Belum semua ikut pertemuan orientasi asuhan persalinan normal bagi pengelola persalinan, klinik utama, klinik pratama dan faskes Praktik Mandiri Bidan.
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan capaian kinerja 99,1%, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Masih terdapat bayi yang meninggal sebelum usia 8 hari sebanyak 99 kasus ;
 - b. Masih terdapat 26 bayi meninggal dunia sebelum masuk masa KN 3.
4. Pelayanan kesehatan balita dengan capaian kinerja 92,1%, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Posyandu hanya berjalan beberapa kali pertemuan karena masih masa pandemi
 - b. Posyandu yang sudah berjalan dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat namun belum bisa optimal hingga menjangkau semua sasaran balita
 - c. Pelaksanaan penimbangan balita sesuai standar minimal 8 kali belum maksimal
 - d. Pelaksanaan SDITK minimal 2 kali belum maksimal

- e. Pelayanan MTBS pada balita sakita belum maksimal
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, dengan capaian kinerja 56,3%, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
- a. Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan wadah Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)
 - b. Penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala belum bisa dilaksanakan maksimal selama masa pandemi ini
 - c. Kebijakan pemerintah terkait dengan pembelajaran jarak jauh dan luring maupun kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas serta kebijakan vaksinasi
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif dengan, capaian kinerja 31%, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat usia produktif untuk melakukkan screening atau tes kesehatan
 - b. Belum optimalnya pemanfatan posbindu yang ada di semua desa/kelurahan teramsuk insatansi pemerintah
 - c. Dukungan lintas sektoral yang belum optimal dalam penyediaan sarana prasarana posbindu
 - d. Masih kurangnya kader kesehatan yang terlatih di masayarakat
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dengan, capaian kinerja 49,1 %, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
- a. Posnyandu lansia belum berjalan karena adanya keterbatasan pertemuan
 - b. Adanya aturan PPKM
 - c. Belum adanya regulasi pelayanan lansia di tingkat kabupaten
 - d. Kurang dukungan pemerintah desa dalam penyelenggaraan posyandu lansia
 - e. Keterbatasaan sarana dan prasarana pelayanan lansia standar di puskesmas
 - f. Pengelola program lansia sering ganti sehingga mempengaruhi pelaksanaan program yang ada
 - g. Petugas kesehatan yang ada masih difokuskan pada percepatan vaksinasi covid 19

8. Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi dengan, capaian kinerja 35,1 %, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Sarana dan Prasarana untuk operasional Pandu PTM masih belum tercukupi
 - b. Data pelayanan pasien hipertensi baru hanya dari puskesmas sedangkan jejaring puskesmas belum masuk
9. Pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat, dengan capaian kinerja 65,2 %, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Masih ada keberatan dari pihak keluarga kalau ada ODGJ yang dirujuk ke RSJ karena keterbatasan biaya
10. Pelayanan kesehatan pada terduga penderita TB, dengan capaian kinerja 51,9 %, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pelacakan kasus belum dilaksanakan maksimal
 - b. Jumlah kunjungan pasien TB ke fasilitas pelayanan kesehatan semakin berkurang
 - c. Adanya kekhawatiran petugas dan masyarakat terhadap gejala tb yang hampir mirip dengan covid 19 sehingga masyarakat enggan periksa dan tenaga kesehatan kesulitan dalam mendiagnosis penyakit pasien
11. Pelayanan kesehatan pada orang beresiko tertular HIV, dengan capaian kinerja 96,2 %, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Berkurangnya kunjungan populasi kunci ke layanan kesehatan khususnya LSL/GAY
 - b. Tidak terlaksananya Mobile VCT secara maksimal
 - c. Faktor pandemic covid – 19
 - d. Belum semua layanan kesehatan memiliki konselor HIV
 - e. Kurangnya dukungan pembiayaan Laboratorium Rujukan

4. Program dan Alokasi Anggaran

Total alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 yang rangka mendukung penerapan SPM bidang Kesehatan yakni sebesar Rp 5.635.811.066,-dengan rincian alokasi anggaran per jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel 2.7
Program dan Alokasi Anggaran
Penerapan SPM Bidang Kesehatan

	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Anggaran	
			Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.537.780.775,-	579.542.767,-
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin		4.083.296.454,-	3.479.465.650,-
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir		108.035.000,-	17.004.900,-
4.	Pelayanan kesehatan balita		580.229.500,-	258.885.000,-
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		608.108.900,-	285.885.500,-
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif		240.892.950,-	126.016.950,-
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		531.062.400,-	259.749.700,-
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi		241.849.900,-	88.110.000,-
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus		297.948.700,-	111.180.550,-
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		176.182.000,-	96.009.500,-
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		177.861.409,-	88.143.709,-
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		490.673.694,-	245.778.540,-
Jumlah			9.073.921.682,-	5.635.811.066,-

5. Dukungan Personil

Perangkat daerah pelaksana SPM bidang urusan kesehatan di Kabupaten Banjarnegara yaitu Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara mengkoordinasikan 35 (tiga puluh lima) Puskesmas, 1 (satu) UPTD Gudang Farmasi, 1 (satu) UPTD Labkes serta 1

(satu) Rumah Sakit Umum Daerah dengan dukungan personil sebagai berikut:

Tabel 2.8
Dukungan Personil
Penerapan SPM Bidang Kesehatan

Nama Perangkat Daerah	JFT	JFU	Struktural	Jumlah
Dinas Kesehatan	790	347	78	1.169

Jumlah PNS di Dinas Kesehatan Tahun 2021 total sebanyak 1.169, meliputi tenaga PNS di Dinas Kesehatan dan Unit Pelayanan Teknis Dinas. Jika diuraikan berdasarkan kualifikasi Pendidikan maka jumlah PNS dengan kualifikasi Pendidikan SD sejumlah 0 Orang, SMP sejumlah 0 orang, SMA 534 orang, Diploma 1,2,3 sejumlah 481 orang, Srata 1 sejumlah 120 orang, dan Srata 2 sejumlah 32 orang.

Berdasarkan kualifikasi golongan, maka Golongan I sejumlah 15 orang, Golongan II sejumlah 525 orang, Golongan III sejumlah 592 orang dan Golongan IV sejumlah 37 orang. Berdasarkan Kualifikasi Jabatan terdiri dari Jabatan Struktural sejumlah 10 orang, Jabatan Fungsional Tertentu sejumlah 790 orang, dan Jabatan Fungsional Umum sejumlah 347 orang.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2020, maka di Tahun 2021 ada Pengurangan pada jabatan struktural sebanyak 78 orang dan penambahan pada jabatan fungsional tertentu sebanyak 78 orang. Hal ini sebagaimana telah di amanatkan dalam Peraturan Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM di bidang kesehatan pada jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Secara umum, penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kab. Banjarnegara Tahun 2021 telah dilaksanakan meskipun belum dapat memenuhi target capaian secara nasional. Hal ini

di sebabkan oleh beberapa kendala, baik dari Perangkat Daerah yang membidangi 6 urusan pelayanan dasar maupun terkendala oleh regulasi tentang standar teknis masing-masing urusan.

Kendala tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

1. Belum terdokumentasinya data-data dengan baik pada beberapa Perangkat Daerah sehingga terkendala dalam pengumpulan data sasaran dan pendukung;
2. Penyusunan target capaian SPM Kab terkendala dengan tingginya target capaian SPM secara nasional yaitu 100%. Dengan target waktu yang sangat terbatas dan target capaian yang dipatok sangat tinggi;
3. Penghitungan kebutuhan anggaran terkendala belum terlaksananya e-costing (petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis perencanaan pembiayaan) pembiayaan SPM meskipun piranti penghitungan SISCOBIKES SPM sudah ada.
4. Pencapaian target SPM di Kab. Banjarnegara masih terkendala anggaran, sehingga seharusnya penerapan SPM yang ditekankan oleh pemerintah pusat juga harus diikuti dengan penganggarannya kepada daerah, dari penyusunan Rencana Aksi pencapaian SPM
5. Jumlah dukungan personil yang dibutuhkan sesuai dengan kualifikasi untuk memenuhi SPM yang dipersyaratkan masih terbatas;
6. Adanya pandemi covid-19 pada tahun 2021 yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian indikator SPM Bidang Kesehatan baik dari sisi penganggaran adanya refocusing anggaran untuk pembiayaan penanganan pandemi covid-19, keterbatasan personil terfokus pada pelayanan penemuan, tracking, penanganan kasus covid-19, adanya kebijakan pembatasan kegiatan kemasyarakatan, menurunnya kunjungan masyarakat untuk memeriksakan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan dikarenakan takut tertular covid-19.

Adapun Solusi untuk mengatasi Permasalahan tersebut adalah :

1. Melaksanakan sosialisasi dan kebutuhan penghitungan penganggaran dalam pencapaian indikator SPM melalui aplikasi SISCOBIKES 2.0

sebagaimana telah di amanatkan oleh Kementerian Kesehatan RI, hasil dari penghitungan tersebut sebagai bahan acuan Dinas Kesehatan dalam penguatan usulan kebutuhan pembiayaan aspek indikator SPM.

2. Meningkatkan kompetensi dan advokasi penambahan SDMK
3. Meningkatkan advokasi, komunikasi dan koordinasi dengan pihk terkait untuk mendukung ketersediaan kebutuhan logistik pencapaian SPM
4. Meningkatkan peran aktif lintas sektor dan jejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta;

C. BIDANG PEKERJAAN UMUM

Standar teknis SPM bidang pekerjaan umum mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berikut disampaikan capaian dan anggaran dalam pemenuhan SPM bidang Pekerjaan Umum :

1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM bidang Pekerjaan Umum terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar, antara lain :

- a. **Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**, dengan indikator pencapaian yakni Jumlah Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari, dan rumus perhitungan kinerja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari}}{\text{Jumlah seluruh warga negara di Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2021}} \times 100\%$$

- b. **Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik**, dengan indikator pencapaian yakni Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik, dan rumus perhitungan kinerja sebagai berikut:

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

$$\frac{\text{Jumlah seluruh warga negara di Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2021}}{\text{Jumlah seluruh warga negara di Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2021}} \times 100\%$$

Terdapat perbedaan satuan yang digunakan pada Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 dengan satuan yang digunakan pada Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 mengatur satuan sasaran pemenuhan layanan dasar dengan jumlah warga negara sedangkan dalam Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 satuan yang digunakan adalah sambungan rumah (SR).

Untuk perhitungan capaian SPM bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Banjarnegara sebagaimana arahan dari Bagian Otonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah maka yang digunakan adalah satuan Sambungan Rumah (SR).

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum ditetapkan sebesar 100% terhadap jumlah target yang harus dipenuhi layanan dasarnya pada tahun berkenaan. Berikut disampaikan target pemenuhan layanan dasar bidang bidang Pekerjaan Umum :

Tabel 2.9
Target Warga Negara yang Mendapat Pelayanan Dasar
Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target Warga Negara yang Seharusnya Mendapat Pelayanan Dasar	
		Kualifikasi	Jumlah (SR)
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.	238.481
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	166.009

3. Realisasi

Tabel 2.10
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Pembilang	Penyebut	Capaian Kinerja (%)
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.	238.481	250.464	95,22
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	166.009	254.440	65,24

Dari target yang telah ditetapkan pemenuhan layanan air minum sehari-hari dan pengolahan air limbah pada Tahun 2021 masing-masing tercapai 100%.

Adapun total realisasi penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi penduduk Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2021 dari total 953.954 jiwa, telah terpenuhi sebanyak 238.481 jiwa atau sebesar 95,22%. Sedangkan untuk layanan pengolahan air limbah domestik telah terpenuhi secara minimal bagi 166.009 jiwa atau sebesar 65,24 %.

4. Program dan Alokasi Anggaran

Total alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 yang dalam rangka mendukung penerapan SPM bidang Pekerjaan Umum yakni sebesar Rp. 15.150.117,00 dengan rincian alokasi anggaran per jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel 2.11
Program dan Alokasi Anggaran Penerapan SPM
Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Anggaran	
			Alokasi	Realisasi
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Rp. 9.885.259.000	Rp.9.034.852.950
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Rp. 5.272.355.500	Rp.5.206.763.550
		TOTAL	Rp. 15.150.117.000	Rp.14.241.616.500

5. Dukungan Personil

Perangkat daerah yang menjadi leadingsector dalam penerapan dan pelaporan SPM bidang urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Banjarnegara yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dengan dukungan personil sebagai berikut:

Tabel 2.12
Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah	JFT	JFU	Struktural	Jumlah
Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Bidang Kawasan Permukiman)	1	5	3	9

1. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan utama dalam penerapan SPM bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Banjarnegara yaitu :

- a) Keterbatasan anggaran dibandingkan dengan kebutuhan daerah yang terlayani berdasarkan banyaknya usulan yang masuk, mengakibatkan tidak semua indikator dapat tercapai.
- b) Masih belum lengkapnya perangkat acuan untuk keperluan penyelenggaraan prasarana sarana, baik norma, standar, pedoman maupun manual.

- c) Belum intensnya koordinasi antar instansi sehingga dalam beberapa aspek menimbulkan adanya perbedaan persepsi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- d) Masih terjadinya inefisiensi pada beberapa aspek penyelenggaraan prasarana sarana.
- e) Belum tercapainya kesinambungan antara program jangka panjang, jangka menengah dan program tahunan.
- f) Pada beberapa indikator kinerja pencapaian SPM terdapat lebih dari satu instansi yang menangani data dan kegiatan dalam satu indikatornya.
- g) Keterbatasan jumlah dan kapasitas personil / tim dalam pendampingan / pelaksanaan kegiatan

Perhitungan capaian kinerja layanan pemenuhan air minum sehari-hari dan layanan pengolahan air limbah didasarkan jumlah pelanggan PDAM (air munum dan L2T2) dan pembangunan sambungan rumah yang telah dilaksanakan Perangkat Daerah maupun *stakeholder*nya dengan asumsi 1 SR sama dengan 4 (empat) jiwa. Serta pendataan yang telah dilaksanakan Dinas Kesehatan terhadap septictank dan sumur bor terlindungi dengan asumsi 1/3 (satu per tiga) KK yang terdata tersebut juga merupakan pelanggan PDAM.

Dari permasalahan tersebut, solusi yang perlu diambil yaitu meningkatkan koordinasi antar *stakeholder* untuk melaporkan capaian kinerjanya per tahun tersedianya anggaran untuk memenuhi target capaian kegiatan, SDM pengampu SPM serta membangun *database by name by address* , dalam rangka pemenuhan layanan dasar kebutuhan air minum sehari-hari maupun layanan pengolahan air limbah.

D. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Sebagaimana SPM bidang Pekerjaan Umum, teknis pelaksanaan SPM bidang Perumahan Rakyat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar untuk SPM bidang Perumahan Rakyat, antara lain :

- a. **Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/Kota**, dengan indikator pencapaian yakni Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni, dan rumus perhitungan kinerja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$$

- b. **Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota**, dengan indikator pencapaian yakni Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni, dan rumus perhitungan kinerja sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100\%$$

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat yaitu 100% terhadap warga negara yang seharusnya mendapat pelayanan untuk setiap jenis pelayanan dasar, yakni: 1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/ Kota dan 2) penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Kabupaten/ Kota

Adapun jumlah warga negara yang seharusnya memperoleh pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13
Target Warga Negara yang Mendapat Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target Warga Negara yang Seharusnya Mendapat Pelayanan Dasar	
		Kualifikasi	Jumlah (Orang)
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	45
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni.	-

3. Realisasi

Tabel 2.14
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Pembilang	Penyebut	Capaian Kinerja (%)
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni. (unit Rumah)	45	45	100
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi	Jumlah Warga Negara yang terkena	-	-	-

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Pembilang	Penyebut	Capaian Kinerja (%)
	Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni.			

Sebagaimana tahun 2020, pada tahun 2021 di Kabupaten Banjarnegara tidak terjadi bencana di tingkat Kota sehingga capaian kinerja jenis pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/Kota pada Tahun 2021 sama dengan capaian kinerja di tahun 2020.

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota kurang optimal dikarenakan anggaran untuk penyediaan rumah layak huni bagi warga negara yang terkena relokasi tersedia pada anggaran perubahan sehingga tidak semua warga yang menjadi target dapat terlayani. Kegiatan Relokasi Bencana mendapat anggaran dari APBD Propinsi Jawa Tengah (BTT).

4. Program dan Alokasi Anggaran

Total alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat yakni sebesar Rp. 46.555.000,- dengan rincian alokasi anggaran per jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel 2.15
Program dan Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Anggaran	
			Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/Kota	Program Pengembangan Perumahan	46.555.000	399.000.000
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota		-	-
Total			46.555.000	399.000.000

5. Dukungan Personil

Perangkat daerah pelaksana SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten Banjarnegara yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperum KPP) dengan dukungan personil sebagai berikut:

Tabel 2.16
Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah	JFT	JFU	Struktural	Jumlah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Bidang Perumahan)	1	2	2	5

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam pemenuhan SPM di bidang Perumahan Rakyat adalah bahwa dalam pelayanan dasar Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat sesuai dengan target yang ditetapkan pada anggaran APBD Kabupaten karena pelaksanaan kegiatan di laksanakan dengan annggaran perubahan sehingga layanan

kepada warga yang berhak menerima pelayanan dasar tidak dapat terpenuhi secara keseluruhan, Penanganan pasca bencana banyak yang belum tuntas, dari pengadaan lahan/ pengganti lahan bengkok/ kas desa yang belum terselesaikan, pembangunan rumah bagi korban bencana dan psu perumahan yang belum memadai dan Kewenangan penanganan pada daerah rawan bencana/ bencana apabila tidak ada SK penetapan bencana oleh kepala daerah, misalnya untuk pembangunan/ rehabilitasi rumah bagi korban bencana/ dinding penahan tanah/ bronjong/ psu perumahan lainnya.

Solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan melanjutkan program di tahun 2021 diperuntukkan bagi warga yang belum memperoleh layanan di tahun sebelumnya.

E. BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pelaksanaan SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas) dibagi menjadi 3 (tiga) sub-urusan, antara lain :

- a. Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Bencana; dan
- c. Kebakaran

Adapun acuan pelaksanaan teknis SPM bidang Trantibum Linmas berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar untuk SPM bidang Trantibum Linmas, antara lain:

- a. **Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**, dengan indikator pencapaian yakni Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan

akibat dari Penegakan hukum Perda dan Perkada, dan rumus perhitungan kinerja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada}}{\text{Jumlah warga negara yang terdampak pelanggaran Perda dan Perkada}} \times 100\%$$

b. **Pelayanan Informasi Rawan Bencana**, dengan indikator pencapaian yakni Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, dan rumus perhitungan kinerja sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancamannya}}{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancamannya}} \times 100\%$$

c. **Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**, dengan indikator pencapaian yakni Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan rumus perhitungan kinerja sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana}}{\text{Jumlah warga di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancamannya}} \times 100\%$$

d. **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**, dengan indikator pencapaian yakni Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan rumus perhitungan kinerja sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah warga terdampak bencana tingkat kota}} \times 100\%$$

e. **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**, dengan indikator pencapaian yakni Jumlah Warga Negara yang memperoleh

layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dan rumus perhitungan kinerja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pelayanan dan evakuasi korban kebakaran}}{\text{Jumlah warga terdampak bencana kebakaran}} \times 100\%$$

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang Trantibum Linmas yaitu sebesar 100% terhadap warga negara yang seharusnya mendapat pelayanan untuk setiap jenis pelayanan dasar, antara lain : 1) Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 2) Pelayanan informasi rawan bencana, 3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, 4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban 5) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Adapun jumlah warga negara yang seharusnya memperoleh pelayanan dasar bidang Trantibum Linmas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.17

Target Warga Negara yang Mendapat Pelayanan Dasar Bidang Trantibum Linmas di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target Warga Negara yang Seharusnya Mendapat Pelayanan Dasar	
		Kualifikasi	Jumlah (Orang)
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari Penegakan hukum Perda dan Perkada	0
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	300
3.	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1000
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	21

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target Warga Negara yang Seharusnya Mendapat Pelayanan Dasar	
		Kualifikasi	Jumlah (Orang)
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	11

3. Realisasi

Tabel 2.18
Capaian SPM Bidang Trantibum Linmas Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Pembilang	Penyebut	Capaian Kinerja (%)
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari Penegakan hukum Perda dan Perkada	0	0	0%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	340	300	113%
3.	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1356	1.000	135%
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	21	21	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Pembilang	Penyebut	Capaian Kinerja (%)
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	11	26	42 %

Selama tahun 2021 Bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan sejumlah 2 Program, 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan. Namun demikian jumlah warga negara yang mendapatkan layanan akibat dari penegakan hukum Perda atau Perkada sejumlah 0, kegiatan penegakan Perda yang dilaksanakan tidak menimbulkan dampak kepada warga yang menjadi obyek kegiatan sehingga capaian dari pelayanan dasa pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sebesar 0 %.

Pada jenis layanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dilakukan penyelamatan dan evakuasi pada sejumlah 11 kejadian kebakaran di Kabupaten Banjarnegara. Seluruh kejadian kebakaran di Kabupaten Banjarnegara dapat tertangani sesuai dengan *response time* yakni kurang dari 15 menit dari diterimanya laporan oleh petugas pemadam kebakaran. Di samping pelayanan utama dalam penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, di tahun 2021 Bidang Pemadam Kebakaran juga melaksanakan layanan penunjang capaian SPM sebagai berikut :

- a. Evakuasi sarang tawon sebanyak 116 kejadian
- b. Evakuasi tangkap ular sebanyak 16 kejadian
- c. Evakuasi pohon tumbang sebanyak 1 kejadian
- d. Evakuasi orang tercebur sumur sebanyak 3 kejadian
- e. Evakuasi Truk masuk selokan sebanyak 1 kejadian
- f. Pelepasan cincin sebanyak 2 kejadian
- g. Penyemprotan (pemusnahan miras, material longsor, dll) sebanyak 33 kejadian dan,

Pada jenis pelayanan informasi rawan bencana dilaksanakan kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana

kabupaten kota per jenis bencana yang dilaksanakan di 5 (lima) desa dan 2 sekolah.

Sementara pada pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dilaksanakan kegiatan pelatihan Desa Tangguh Bencana di 14 (empat belas) desa dengan jumlah peserta 420 orang, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana dengan jumlah peserta 120 orang, Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan jumlah peserta 125 orang relawan.

Pada jenis pelayanan dasar Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, di tahun 2021 terhitung 291 kejadian bencana yang menimbulkan korban jiwa 5 orang dan korban luka – luka 16 orang.

4. Program dan Alokasi Anggaran

Total alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 yang dalam rangka mendukung penerapan SPM bidang Trantibum Linmas yakni sebesar Rp. 520.965.700 dengan rincian alokasi anggaran per jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel 2.19
Program dan Alokasi Anggaran SPM Bidang Trantibum Linmas
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Anggaran	
			Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		0	0
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		26.930.000	25.430.000
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Per Jenis Bencana	26.930.000	25.430.000
3.	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	151.817.500	149.349.300

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Anggaran	
			Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		
		Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	124.182.000	94.850.000
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	329.800.300	310.360.300

Di samping itu, meskipun dalam rangka pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki anggaran khusus sebagai ganti rugi warga negara terdampak, pemberian ganti rugi diberikan melalui hibah/bantuan sosial yang berasal dari anggaran belanja tak terduga Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

5. Dukungan Personil

Perangkat Daerah pengampu SPM bidang Trantibum Linmas antara lain :

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Dinas Pemadam Kebakaran; dan
- 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan dukungan personil sebagai berikut :

Tabel 2.20
Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai			Total Pegawai
	JFT	JFU	Struktural	
1. Satuan Polisi Pamong Praja	-	13	29	42
2. Dinas Pemadam Kebakaran	-	.	.	-
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	12	14	26
Jumlah	-	25	43	68

6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pemenuhan SPM bidang Trantibum Linmas, tidak terdapat permasalahan yang ditemukan. Seluruh layanan dasar dapat dilaksanakan sesuai mutu yang ditentukan.

F. BIDANG SOSIAL

Pelaksanaan SPM bidang Sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar untuk SPM bidang Sosial, antara lain :

- a. **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti**, dengan indikator pencapaian yakni Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, dan rumus perhitungan kinerja sebagai berikut :

*Jumlah penyandang disabilitas yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di luar panti sosial*

*Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah x 100%
kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi
sosial dasar di luar panti sosial*

- b. **Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti**, dengan indikator pencapaian yakni Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, dan rumus perhitungan kinerja sebagai berikut:

Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial

Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota x 100% yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial

- c. **Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti**, dengan indikator pencapaian yakni Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, dan rumus perhitungan kinerja sebagai berikut:

Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial

Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial x 100%

- d. **Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti**, dengan indikator pencapaian yakni Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, dan rumus perhitungan kinerja sebagai berikut:

Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial

Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi Sosial dasar di luar panti sosial x 100%

- e. **Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap & Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota**, dengan indikator pencapaian yakni Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota, dan rumus perhitungan

kinerja sebagai berikut:

Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota $\times 100\%$

2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang Sosial yaitu 100% selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan. Dibawah ini disampaikan target pencapaian SPM bidang Sosial Tahun 2021:

Tabel 2.21
Target Warga Negara yang Mendapat Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target Warga Negara yang Seharusnya Mendapat Pelayanan Dasar	
		Kualifikasi	Jumlah
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.	173
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	Jumlah Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.	173
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti.	1036
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi Sosial di Luar Panti.	73
5.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap & Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana Kab / Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.	100%

3. Realisasi

Tabel 2.22
Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Pembilang (orang)	Penyebut (orang)	Capaian Kinerja (%)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Percentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	357	173	206,36 %
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	Percentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	126	173	72,83%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti	Percentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	273	1036	26,35%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	Percentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	8	73	10,96
5.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap & Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Percentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	529	529	100

Pada jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas capaian terpenuhi sebesar 206,36%, dimana

dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas dilaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain pemberian alat bantu, permaknanan serta sandang dan pemberian modal usaha kepada Shelter Worksop Peduli DADI MULYA Desa Gumiwang Kecamatan Purwanegara

Pada jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar capaian terpenuhi sebesar 72,83%, layanan dasar ini belum mencapai target karena belum maksimalnya dinas sosial kab banjarnegara dalam berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam penanganan anak terlantar.

Pada jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar dilakukan pemenuhan kebutuhan dasar para lanjut usia terlantar di antaranya kebutuhan makan, sandang, bimbingan rohani serta pemeriksaan kesehatan.

Pada jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis dilaksanakan berdasarkan rujukan atau rekomendasi dari Satpol PP yang memiliki kewenangan dalam melakukan razia gelandaangan, pengemis dan PGOT lainnya. Pelayanan yang dilakukan oleh dinas di sesuikan dengan kebutuhan dasar yang diperlukan penerima manfaat di saat assessment.

Sementara untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota, di tahun 2021 terdapat 529 orang terdampak yang secara keseluruhan mendapatkan penanganan dengan capaian 100%.

4. Program dan Alokasi Anggaran

Berikut disampaikan program pendukung dan anggaran dalam rangka pemenuhan SPM bidang Sosial :

Tabel 2.23
Program dan Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Anggaran (Rp)	
			Alokasi	Realisasi
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Program Pemberdayaan Sosial	644.064.500	594.158.097

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Anggaran (Rp)	
			Alokasi	Realisasi
2.	Di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	644.064.500	594.158
		Penyediaan Permakanan	69.400.000	67.962.000
		Penyediaan Sandang	17.824.500	17.744.500
		Penyediaan Alat Bantu	550.247.200	501.858.787
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	250.900	250.900
		Pemberian Bimbingan Fisik, mental, Spritual dan Sosial	1.875.000	1.875.000
		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, LUT, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.875.000	1.875.000
		Fasilitasi Pembuatan NIK, Akta lahir, Surat Nikah dan KIA	926.300	926.300
		Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	250.900	250.900
		Pemberian layanan Data dan Pengaduan	178.300	178.300
		Pemberian Layanan Kedaruratan	214.600	214.600
		Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	710.900	710.900
		Pemberian Layanan Rujukan	310.900	310.900
5	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap & Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Program Penanganan Bencana	80.851.000	78.295.000
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	80.851.000	78.295.000
		Penyediaan makanan	80.851.000	78.295.000

5. Dukungan Personil

Perangkat Daerah pengampu SPM bidang Sosial yaitu Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara. Dengan dukungan personil sebagai berikut :

Tabel 2.24
Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Sosial
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai			Total Pegawai
	JFT	JFU	Struktural	
1. Dinas Sosial	2	3	6	11
Jumlah	2	3	6	11

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Personil
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	11
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	
5	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap & Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota	
	Jumlah	11

Dalam pelaksanaan pelayan SPM dinas juga di bantu oleh 2 Pekerja Sosial, 20 TKSK dan 35 anggota Taganan

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Keterbatasan kapasitas panti rujukan PMKS

Sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, penanganan PMKS dalam panti menjadi wewenang pemerintah Provinsi. Namun jumlah PMKS yang harus dirujuk ke panti tidak sebanding dengan kapasitas panti yang tersedia khususnya untuk eks psikotik

2. Belum adanya data by name by address pemerlu kesejahteraan sosial yang memerlukan layanan kebutuhan dasar sesuai jenis kebutuhannya.

Solusi

1. Berkoordinasi dengan panti/balai kementerian sosial khususnya yang berada di wilayah Jawa Tengah, sehingga PMKS yang membutuhkan layanan rehabilitasi dalam panti dapat segera mendapatkan layanan rehabilitasi
2. Pemenuhan data pemerlu layanan melalui pemerintah Desa dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banjarnegara dalam rangka pemenuhan layanan dasar kepada masyarakat didukung dengan anggaran melalui program dan kegiatan yang diampu oleh Perangkat Daerah yang membidangi 6 urusan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal.

Berikut adalah rincian alokasi serta realisasi anggaran pada program dan kegiatan yang mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021:

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan Penunjang Penerapan SPM Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	Pendidikan									96.39%
		1	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	<i>Program Pengelolalan Pendidikan</i>			171.512.912.423	166.621.461.256	97.15%
				Dinas Pendidikan	<i>Pengelolaan Pendidikan Dasar</i>			171.512.912.423	166.621.461.256	97.15%
						Penambahan ruang kelas baru	695.000.000	687.584.000	98.93%	
						Pembangunan Perpustakaan Sekolah	873.610.000	870.1140.000	99.60 %	
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.248.265.000	2.236.567.750	99.48%	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	28.508.247.000	26.986.919.500	94.66%	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	90.000.000	89.385.000	99.32%	
						Pengadaan Mebel Sekolah	1.308.900.000	1.192.835.000	91.13%	
						Pengadaan Perlengkapan Siswa	100.000.000	98.645.976	98.65%	
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.540.000.000	1.520.978.500	98.76%	

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	192.516.900	185.766.100	96.49%	
						Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	151.582.700	140.821.500	92.90%	
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	217.619.200	177.457.200	81,54%	
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	438.345.400	396.891.300	90.54%	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	810.582.800	699.825.000	86.34%	
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	64.670.364.486	64.253.355.205	99.36%	
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	282.000.000	281.274.500	99,74%	
						Pemeliharaan Mebel Sekolah	1.615.000.000	1.516.934.000	93.93%	
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah		46.624.991.137	44.930.596.885	96.37%	
						Penambahan Ruang Kelas Baru	1.409.646.000	1.395.695.000	99.01%	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	761.000.000	616.475.650	81,01%	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.761.840.000	6.028.848.700	89.16%	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	871.000.000	740.015.500	84.96%	

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	35.000.000	31.854.000	91.01%	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	591.000.000	533.878.400	90.33%	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.095.989.000	1.929.874.750	92.07%	
						Perlengkapan Belajar Peserta Didik	200.000.000	198.000.300	99.00%	
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.245.000.000	1.243.675.400	99.89%	
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	62.555.800	59.783.180	95.57%	
						Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	43.306.800	41.416.200	95.63%	
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	281.837.700	279.387.700	99.13%	
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	162.214.400	148.080.100	91.29%	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	665.260.500	631.925.540	94.99%	
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	29.949.340.937	29.806.892.065	99.52%	
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	100.000.000	99.643.400	99.64%	
						Pemeliharaan Mebel Sekolah	1.390.000.000	1.145.151.000	82.38%	

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
				SMP Negeri 1 Susukan	Program Pengelolaan Pendidikan				
						Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	66.410.000	64.535.000	98.60%
				SMP Negeri 2 Susukan			50860000	50024924	98.36%
				SMP Negeri 3 Susukan			37.780.000	36.581.432	96.83%
				SMP Negeri 1 Purwareja Klampok			67.380.000	66.283.792	98.37%
				SMP Negeri 2 Purwareja Klampok			31.330.000	30.234.360	96.50%
				SMP Negeri 3 Purwareja Klampok			59.749.750	59.158.579	99.01%
				SMP Negeri 1 Mandiraja			64.330.000	61.106.748	94,99%
				SMP Negeri 2 Mandiraja			65.140.000	64.168.757	98,51%
				SMP Negeri 3 Mandiraja			41.620.000	39.876.300	95,81%
				SMP Negeri 4 Mandiraja			30.489.900	27.835.000	91,29%
				SMP Negeri 1 Purwanegara			70.489.880	67.907.557	96,34%
				SMP Negeri 2 Purwanegara			55.970.000	55.549.318	99,25%
				SMP Negeri 3 Purwanegara			32.100.000	31.924.582	99,45%

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SMP Negeri 4 Purwanegara			22.720.000	22.172.240	97,59%	
				SMP Negeri 5 Satu Atap Purwanegara			26.600.000	25.629.992	96,35%	
				SMP Negeri 1 Bawang			63.670.000	62.470.433	98,12%	
				SMP Negeri 2 Bawang			60.420.000	54.149.193	89,62%	
				SMP Negeri 3 Bawang			36.230.000	33.241.278	91,75%	
				SMP Negeri 4 Satu Atap Bawang			18.100.000	18.039.998	99,67%	
				SMP Negeri 5 Bawang			29.260.000	28.539.610	97,54%	
				SMP Negeri 1 Banjarnegara			56.750.000	55.592.373	97,96%	
				SMP Negeri 2 Banjarnegara			67.060.000	66.950.910	99,84%	
				SMP Negeri 3 Banjarnegara			41.680.000	41.083.900	98,67%	
				SMP Negeri 4 Banjarnegara			39.969.800	39.288.148	98,29%	
				SMP Negeri 5 Banjarnegara			53.270.000	52.608.480	98,76%	
				SMP Negeri 1 Pagedongan			41.930.000	41.616.950	99,25%	

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SMP Negeri 2 Satu Atap Pagedongan				33.200.000	28.165.000	84,83%
				SMP Negeri 1 Sigaluh				44.720.000	43.868.543	98,10%
				SMP Negeri 2 Satu Atap Sigaluh				19.920.000	19.920.000	100%
				SMP Negeri 1 Madukara				54.850.000	54.679.009	99,69%
				SMP Negeri 2 Madukara				20.860.000	20.121.820	96,46%
				SMP Negeri 1 Banjarmangu				57.370.000	57.181.447	99,67%
				SMP Negeri 2 Banjarmangu				32.240.000	32.240.000	100%
				SMP Negeri 1 Wanadadi				59.480.000	57.873.455	97,30%
				SMP Negeri 2 Wanadadi				63.240.000	63.168.147	99,89%
				SMP Negeri 1 Rakit				50.890.000	50.792.060	99,81%
				SMP Negeri 2 Rakit				54.040.000	53.457.223	98,92%
				SMP Negeri 1 Punggelan				74.410.000	73.530.028	98,82%
				SMP Negeri 2 Punggelan				39.520.000	39.312.330	99,47%
				SMP Negeri 3 Punggelan				42.980.000	41.861.820	97,40%
				SMP Negeri 4 Punggelan				29.540.000	29.081.480	98,45%

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SMP Negeri 1 Karangkobar				62.650.000	62.233.621	99.34%
				SMP Negeri 2 Karangkobar				28.980.000	28.688.240	98.99%
				SMP Negeri 1 Pagetan				51.160.000	49.627.390	97.00%
				SMP Negeri 2 Pagetan				28.630.000	28.630.000	100%
				SMP Negeri 3 Pagetan				26.220.000	26.218.500	99.99%
				SMP Negeri 4 Satu Atap Pagetan				23.850.000	23.849.800	100%
				SMP Negeri 5 Pagetan				22.539.750	21.600.000	95.83%
				SMP Negeri 1 Pejawaran				37.170.000	37.170.000	100%
				SMP Negeri 2 Pejawaran				33.875.000	33.875.000	100%
				SMP Negeri 3 Satu Atap Pejawaran				20.199.960	19.162.460	94,86%
				SMP Negeri 4 Pejawaran				19.529.840	19.057.500	97,58%
				SMP Negeri 1 Batur				29.890.000	29.807.730	99.72%
				SMP Negeri 2 Batur				24.639.800	23.749.040	96,38%
				SMP Negeri 1 Wanayasa				33.390.000	33.313.080	99,77%

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SMP Negeri 2 Wanayasa			27.789.900	27.781.300	99,97%	
				SMP Negeri 3 Wanayasa			22.960.000	22.960.000	100%	
				SMP Negeri 4 Wanayasa			29.670.000	24.839.720	83.72%	
				SMP Negeri 1 Kalibening			58.640.000	58.136.173	99.14%	
				SMP Negeri 2 Kalibening			26.640.000	26.414.998	99.16%	
				SMP Negeri 3 Kalibening			27.130.000	26.835.208	98.91%	
				SMP Negeri 4 Kalibening			26.430.000	26.081.370	98.68%	
				SMP Negeri 1 Pandanarum			39.830.000	39.671.086	99.60%	
				SMP Negeri 2 Satu Atap Pandanarum			20.339.880	20.087.197	98.76%	
				TK Negeri Pembina Banjarnegara			45.909.965	44.965.800	97.94%	
				SMP Negeri 3 Pagedongan			23.380.000	22.794.586	97.50%	
				SMP Negeri 4 SATAP Susukan			25.460.000	25.460.000	100%	
				SMP Negeri 6 SATAP Purwanegara			16.630.000	16.477.500	99.08%	

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SMP Negeri 6 SATAP Banjarnegara				22.571.600	22.517.600	99.76%
				SMP Negeri 5 SATAP Punggelan				17.189.800	17.189.800	100%
				SMP Negeri 6 SATAP Punggelan				19.429.800	17.000.000	87.49%
				SMP Negeri 3 SATAP Karangkobar				16.660.000	16.214.559	97.33%
				SMP Negeri 5 SATAP Kalibening				18.450.000	18.257.660	98.96%
				SMP Negeri 6 SATAP Kalibening				18.170.000	18.170.000	100%
				SMP Negeri 3 SATAP Pandanarum				20.430.000	20.290.184	99.32%
				SMP Negeri 4 SATAP Pandanarum				19.250.000	19.187.032	99.67%
				TK Negeri Pembina Wanadadi				54.554.715	51.200.715	93.85%
				TK Negeri Pembina Madukara				31.279.920	31.201.925	99.75%
				TK Negeri Pembina Mandiraja				56.549.785	55.689.855	98.48%

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dinas Pendidikan	<i>Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</i>	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30.254.179.700	30.076.528.900	99.41%	
						Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30.254.179.700	30.076.528.900	99.41%	
	2	Pendidikan Kesetaraan					3.967.332.500	3.926.919.340	98.98%	
			Dinas Pendidikan		<i>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>		3.967.332.500	3.926.919.340	98.98%	
				Dinas Pendidikan	<i>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>		3.967.332.500	3.926.919.340	98.98%	
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	200.000.000	177.469.000	88.73%	
						Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	1.108.932.500	1.091.050.340	98.39%	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.658.400.000	2.658.400.000	100%	
			UPT Sanggar Kegiatan Belajar	UPT Sanggar Kegiatan Belajar	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.400.000	2.400.000		
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.475.900	51.475.600		
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.000.000	16.927.135		

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.636.000	18.494.000		
						Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	16.200.000	16.200.000		
						Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	437.490.700	437.488.700		
	3	Pendidikan Anak Usia Dini								
		Dinas Pendidikan			Program Pendidikan Anak Usia Dini		17.178.555.300	16.428.564.500	95.63%	
				Dinas Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini		17.178.555.300	16.428.564.500	95.63%	
						Pembangunan sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD	141.464.000	140.427.500	99.27%	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang kelas/Ruang Guru PAUD	964.837.000	688.229.000	71.33%	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	36.360.000	35.510.500	97.66%	
						Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	30.000.000	30.000.000	100%	
						Pengadaan alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	50.000.000	50.000.000	100%	
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pasa Satuan Pendidikan PAUD	76.122.500	76.122.500	100%	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	15.879.771.800	15.408.275.000	97.03%	

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	Kesehatan		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					1.708.193.275	749.670.767	43,89 %
		1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	165.530.000	161.300.000	97,44 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		BANJARMAN GU 1			78.699.900	38.564.150	49,00 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		SIGALUH 2			21.520.000,00	15.615.000	72,56 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		BANJARMAN GU 2			97.951.300,00	28.341.300	28,93 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		BATUR 1			45.625.000,00	0	0,00%
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		BATUR 2			17.980.000,00	9.130.000	50,78 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		BAWANG 1			23.321.500,00	8.112.500	34,79 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		BAWANG 2			48.547.100,00	11.730.000	24,16 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		KALIBENING			41.051.600,00	16.098.000	39,21 %

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	KARANGKOB AR				55.220.237 66.743.000	55.220.237	82,74 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	MADUKARA 1				23.550.000,00	17.100.000	72,61 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	MANDIRAJA 2				51.471.875,00	37.875.000	73,58 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PAGENTAN 1				36.392.500,00	24.022.000	66,01 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PANDANARU M				43.153.000,00	12.570.000	29,13 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PURWANEGA RA 2				31.900.000,00	18.150.000	56,90 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PWJ KLAMPOK 1				52.284.000,00	0	0,00%
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PWJ KLAMPOK 2				5.780.000,00	2.610.000	45,16 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	RAKIT 1 SUSUKAN1				24.802.800,00	5.662.800	22,83 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					16.350.000,00	8.100.000	49,54 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	SUSUKAN 2	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		65.910.800,00	13.047.600	19,80 %

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		WANADADI 1		Pertolongan persalinan bagi ibu hamil (DAK Non Fisik)	38.830.000,00	18.670.000	48,08 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		WANADADI 2			28.820.000,00	20.720.000	71,89 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	WANAYASA 2	<i>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</i>		20.450.000,00	6.520.000	31,88 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		BANJARNEG ARA 1		Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	43.945.000,00	33.500.000	76,23 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		BANJARNEG ARA 2			23.045.000,00	14.025.000	60,86 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		PAGENTAN 2			51.700.000,00	33.497.800	64,79 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		PUNGELAN 2			33.364.900,00	32.100.000	96,21 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		WANAYASA 1			93.400.000,00	2.400.000	2,57%
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		PAGEDONGA N			38.320.000,00	8.110.000	21,16%
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		MADUKARA 2			72.640.000,00	11.750.000	16,18%
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		PUNGELAN 1			46.299.000,00	5.190.000	11,21%
			Pelayanan		RAKIT 2				1.400.000	3,31%

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kesehatan Ibu Hamil					42.320.000,00		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		MANDIRAJA 1			57.500.000,00	1.620.000	2,82%
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		PEJAWARAN			36.950.000,00	16.129.380	43,65 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		PURWANEGA RA 1			63.990.000,00	29.720.000	46,44 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		SIGALUH 1			22.330.000,00	11.520.000	51,59 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					35.725.000,00	19.550.000	54,72 %
	2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Dinas Kesehatan				4.065.043.254	3.479.465.65 0	85,59 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		KALIBENING			3.918.659.254	3.448.144.05 0	87,99 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	BANJARMAN GU 1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		8.500.000	4.300.000	50,59 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		BANJARMAN GU 2		Peningkatan kesehatan masyarakat	4.500.000,00	375.000	8,33%
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		BATUR 1			1.120.000,00	0	0,00%
			Pelayanan Kesehatan		BATUR 2			4.900.000,00	3.430.000	70,00 %

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ibu Bersalin							
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		BAWANG 1			900.000,00	0	0,00%
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	KARANGKOB AR	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		7.100.000,00	0	0,00%
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		MANDIRAJA 1		Peningkatan kesehatan masyarakat	2.200.000,00	900.000	40,91 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		MANDIRAJA 2			4.360.000,00	1.248.000	28,62 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		PANDANARU M			13.300.000,00	8.415.000	63,27 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		PUNGGELEN 1			2.300.000,00	1.160.000	50,43 %
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		PURWANEGA RA 2			1.300.000,00	0	0,00%
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		PWJ KLAMPOK 1			23.675.000,00	0	0,00%
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		PWJ KLAMPOK 2			1.560.000,00	0	0,00%
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		RAKIT 1			2.880.000,00	180.000	6,25%
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		SIGALUH 2			9.100.000,00	0	0,00%

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	SUSUKAN 1			4.535.000,00	3.335.000	73,54 %	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	SUSUKAN 2			800.000,00	0	0,00%	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	WANADADI 1			4.580.000,00	520.000	11,35%	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	WANADADI 2			4.150.000,00	2.720.000	65,54 %	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	WANAYASA 2			3.033.000,00	0	0,00%	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	BANJARNEG ARA 1			540.000,00	350.000	64,81 %	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	BANJARNEG ARA 2			5.700.000,00	0	0,00%	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PAGENTAN 2			13.940.000,00	3.948.600	28,33 %	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PAGEDONGA N			720.000,00	440.000	61,11%	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	MADUKARA 2			12.440.000,00	0	0,00%	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PURWANEGA RA 1			1.526.000,00	0	0,00%	

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	SIGALUH 1	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia		3.550.000,00	0	0,00%
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				Pelayanan pemeliharaan kesehatan	3.175.000,00	0	0,00%
		3	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</i>		DINAS KESEHATAN			107.815.000,00	18.039.900,00	16,73 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		BANJARMAN GU 1			10.100.000	7.900.000	78,22 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		BANJARMAN GU 2			4.950.000,00	1.275.000	25,76 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		BATUR 1			3.640.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		BATUR 2			400.000,00	250.000	62,50 %
			Pengelolaan Pelayanan		BAWANG 1			260.000,00	0	0,00%

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kesehatan Bayi Baru Lahir							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		KALIBENING			500.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		MADUKARA 1				0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		MANDIRAJA 1 PAGENTAN 1 PUNGGELEN 1			2.750.000,002. 800.000,00 4.320.000,00	0 614.000 160.000	0,00% 21,93 % 3,70%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	PURWANEGA RA 2	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		600.000,00	0	0,00%

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		PWJ KLAMPOK 1		Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit	7.500.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		PWJ KLAMPOK 2		Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (DAK)	1.600.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		SIGALUH 2			4.200.000,00	1.500.000	35,71 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	SUSUKAN 1	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		295.000,00	155.000	52,54 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		SUSUKAN 2		Pencegahan penularan penyakit Endemik/ Epidemik	5.200.000,00	1.632.800	31,40 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		WANADADI 1			5.980.000,00	1.680.000	28,09 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru		WANADADI 2			2.280.000,00	140.000	6,14%

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Lahir							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		WANAYASA 2			2.400.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		BANJARNEG ARA 1			270.000,00	270.000	100,00 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		BANJARNEG ARA 2			4.200.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		BAWANG 2			4.340.000,00	413.100	9,52%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		PAGENTAN 2			1.000.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		PANDANARU M			1.050.000,00	990.000	94,29 %
			Pengelolaan Pelayanan		WANAYASA 1			5.000.000,00	1.060.000	21,20 %

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kesehatan Bayi Baru Lahir							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		PAGEDONGA N			100.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		PURWANEGA RA 1			21.080.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		SIGALUH 1			5.200.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					4.300.000,00	0	0,00%
		4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		DINAS KESEHATAN			580.819.500,00	255.588.800,00	44,00 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		BANJARMAN GU 1			141.400.000	131.165.000	92,76 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan		BANJARMAN GU 2			9.675.000,00	240.000	2,48%

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Balita							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		BATUR 1			39.585.000,00	220.000	0,56%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	BATUR 2	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (DAK)	5.190.000,00	4.130.000	79,58 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		BAWANG 1	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		4.050.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		KALIBENING		Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	7.600.000,00	4.600.000	60,53 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		KARANGKOB AR			11.100.000	3.800.000	34,23 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		MADUKARA 1			9.425.000,00	600.000	6,37%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		MANDIRAJA 1			33.440.000,00	21.240.000	63,52 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan		PAGENTAN 1			8.480.000,00	1.470.000	17,33 %

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Balita							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		PUNGGELEN 1			8.325.000,00	4.710.000	56,58 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		PURWANEGA RA 2		Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1.260.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		PWJ KLAMPOK 1			15.585.000,00	1.500.000	9,62%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		PWJ KLAMPOK 2			4.180.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		RAKIT 1			14.920.000,00	7.890.000	52,88 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		SIGALUH 2			3.240.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		SUSUKAN 1			8.150.000,00	3.410.000	41,84 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		SUSUKAN 2		Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	11.512.200,00	2.673.800	23,23 %
			Pengelolaan		WANADADI 1				360.000	18,37

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pelayanan Kesehatan Balita					1.960.000,00		%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		WANADADI 2			5.600.000,00	440.000	7,86%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		BANJARNEG ARA 1			15.800.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		BANJARNEG ARA 2			13.900.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		BAWANG 2			50.440.000,00	24.210.000	48,00 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		PAGENTAN 2			32.847.300,00	10.900.000	33,18 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		PANDANARU M			490.000,00	370.000	75,51 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		PUNGGELAN 2			6.580.000,00	2.460.000	37,39 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan		WANAYASA 1			7.350.000,00	0	0,00%

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Balita							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		PAGEDONGA N			7.080.000,00	850.000	12,01%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		RAKIT 2			36.980.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		MADUKARA 2			500.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		PURWANEGA RA 1			20.250.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		SIGALUH 1			16.750.000,00	8.550.000	51,04 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					27.175.000,00	19.800.000	72,86 %
		5	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar</i>		DINAS KESEHATAN			606.353.900,00	250.124.000,00	41,25 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan		BANJARMAN GU 2			154.077.500	136.197.750	88,40 %

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pada usia pendidikan dasar							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar		BANJARMAN GU 1			18.441.700,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar		BATUR 1			9.220.000,00	3.150.000	34,16 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar		BATUR 2			8.200.000,00	5.000.000	60,98 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar		BAWANG 1			4.700.000,00	267.750	5,70%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar		KALIBENING			7.740.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan		KARANGKOB			31.380.000	22.660.000	72,21

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	AR						%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	MADUKARA 1				14.580.000,00	1.200.000	8,23%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	MANDIRAJA 1				6.150.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	MANDIRAJA 2				11.560.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	PAGENTAN 1				15.460.000,00	6.295.000	40,72 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	PUNGGELEN 1				11.515.900,00	2.620.000	22,75 %

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dasar							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar		PWJ KLAMPOK 1			4.340.000,00	4.440.000	102,30 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar		PWJ KLAMPOK 2			4.940.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar		RAKIT 1			14.580.000,00	2.410.000	16,53 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar		SIGALUH 2			3.650.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar		SUSUKAN 1			29.002.000,00	15.482.000	53,38 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan		SUSUKAN 2			12.729.300,00	2.122.000	16,67 %

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pada usia pendidikan dasar							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar		WANADADI 1			12.872.700,00	2.220.000	17,25 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar		WANADADI 2			5.860.000,00	4.440.000	75,77 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar		WANAYASA 2			39.495.000,00	7.450.000	18,86 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar		BANJARNEG ARA 1			17.510.000,00	11.840.000	67,62 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar		BANJARNEG ARA 2			11.015.000,00	5.215.000	47,34 %
			Pengelolaan		BAWANG 2				2.235.500	12,02

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar					18.600.000,00		%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar		PAGENTAN 2			32.351.600,00	1.529.000	4,73%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar		PANDANARU M			340.000,00	340.000	100,00 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar		PUNGGELAN 2			1.120.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar		WANAYASA 1			18.650.000,00	2.160.000	11,58%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan		PAGEDONGA N			4.920.000,00	0	0,00%

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dasar							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	RAKIT 2				38.029.200,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	MADUKARA 2				5.010.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	PEJAWARAN				3.689.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	PURWANEGA RA 1				4.480.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	SIGALUH 1				18.140.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	DINAS KESEHATAN				12.005.000,00	10.850.000	90,38 %

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pada usia pendidikan dasar							
		6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif					240.892.950	126.016.950	52,31 %
		7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut		DINAS KESEHATAN			530.541.550	276.799.700	52,17 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut		BANJARMAN GU 1			21.223.600	18.523.600	87,28 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut		BANJARMAN GU 2			24.775.000,00	23.765.000	95,92 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut		BATUR 1			9.100.000,00	1.400.000	15,38 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut		BATUR 2			2.320.000,00	610.000	26,29 %
			Pengelolaan	BAWANG 1				7.012.500	39,27	

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut					17.856.600,00		%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	KALIBENING				11.714.200,00	1.030.000	8,79%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	KARANGKOB AR				36.600.000	13.500.000	36,89 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	MADUKARA 1				35.250.000,00	31.560.000	89,53 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	MANDIRAJA 1				25.210.000,00	19.160.000	76,00 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	MANDIRAJA 2				1.280.000,00	252.000	19,69 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	PAGENTAN 1				7.700.000,00	5.827.500	75,68 %

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut		PUNGGELEN 1			2.160.000,00	400.000	18,52 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut		PWJ KLAMPOK 1			35.140.000,00	7.932.000	22,57 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut		PWJ KLAMPOK 2			7.580.000,00	90.000	1,19%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut		RAKIT 1			19.210.400,00	8.450.000	43,99 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut		SIGALUH 2			23.460.000,00	18.000.000	76,73 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut		SUSUKAN 1			9.295.000,00	5.395.000	58,04 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia		SUSUKAN 2			6.830.800,00	307.900	4,51%

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			lanjut							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut		WANADADI 1			7.040.000,00	1.480.000	21,02 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut		WANAYASA 2			6.570.000,00	5.730.000	87,21 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut		BANJARNEG ARA 1			9.565.000,00	5.905.000	61,74 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut		BANJARNEG ARA 2			2.150.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut		PAGENTAN 2			4.280.000,00	3.681.400	86,01 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut		PANDANARU M			27.935.950,00	27.072.800	96,91 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan		PUNGGE LAN 2			94.240.000,00	49.060.000	52,06 %

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pada usia lanjut							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut		WANAYASA 1			1.200.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut		PAGEDONGA N			10.970.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut		MADUKARA 2			26.690.000,00	6.105.000	22,87 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut		PEJAWARAN			12.080.000,00	400.000	3,31%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut		PURWANEGA RA 1			7.210.000,00	1.480.000	20,53 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut		SIGALUH 1			3.700.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan					20.205.000,00	12.670.000	62,71 %

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kesehatan pada usia lanjut							
		8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi		DINAS KESEHATAN			50.794.900,00	22.010.000,00	43,33 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi		BANJARMAN GU 1			4.260.000	4.260.000	100,00 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi		BATUR 1			1.750.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi		BAWANG 1			1.000.000,00	900.000	90,00 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi		KALIBENING			730.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi		KARANGKOB AR			3.770.000	1.450.000	38,46 %
			Pengelolaan		PAGENTAN 1				1.200.000	80,00

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi					1.500.000,00		%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi		PURWANEGA RA 2			1.975.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi		SIGALUH 2			6.699.900,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi		SUSUKAN 1			1.615.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi		SUSUKAN 2			960.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi		WANADADI 1			1.680.000,00	1.680.000	100,00 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi		WANAYASA 2			400.000,00	0	0,00%

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi		BANJARNEGARA 1			4.800.000,00	3.720.000	77,50 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi		PAGENTAN 2			800.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi		MADUKARA 2			6.380.000,00	6.100.000	95,61 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi		PURWANEGA RA 1			8.775.000,00	1.350.000	15,38 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi					3.700.000,00	1.350.000	36,49 %
		9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus		DINAS KESEHATAN			49.861.700,00	33.118.700,00	66,42 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan		BANJARMAN GU 1			21.498.700	19.298.700	89,77 %

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			penderita Diabetes Mellitus							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus		KALIBENING			2.000.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus		KARANGKOB AR			2.550.000	3.500.000	72,86 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus		SIGALUH 2			3.500.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus		SUSUKAN 1			1.175.000,00	200.000	17,02 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus		SUSUKAN 2			840.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan		WANADADI 1				0	0,00%

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus					1.680.000,00		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus		WANAYASA 2			400.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus		BANJARNEGARA 2			2.560.000,00	2.170.000	84,77 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus		PAGENTAN 2			1.068.000,00	250.000	23,41 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus		MADUKARA 2			7.790.000,00	7.300.000	93,71 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes		PURWANEGA RA 1			1.350.000,00	1.350.000	100,00 %

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Mellitus							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus					2.500.000,00	0	0,00%
		10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	DINAS KESEHATAN				175.582.000,00	67.189.500,00	38,27 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	KALIBENING				97.165.000	43.505.000	44,77 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	PWJ KLAMPOK 1				2.500.000	3.050.000	81,97 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan	BANJARMAN GU 1				6.900.000,00	3.450.000	50,00 %

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jiwa Berat							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		BANJARMAN GU 2			4.600.000,00	3.200.000	69,57 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		BATUR 1			200.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		BAWANG 1			500.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		MANDIRAJA 1			2.310.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan		MANDIRAJA 2			880.000,00	0	0,00%

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Gangguan Jiwa Berat							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		PUNGGELAN 1			200.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		PURWANEGA RA 2			15.011.900,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		SIGALUH 2			5.514.800,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		SUSUKAN 1			4.560.000,00	2.560.000	56,14 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Orang		SUSUKAN 2			595.400,00	254.600	42,76 %

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dengan Gangguan Jiwa Berat							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		WANADADI 2			1.840.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		WANAYASA 2			7.140.000,00	5.100.000	71,43 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		BANJARNEGARA 2			580.000,00	100.000	17,24 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		BAWANG 2			800.000,00	122.400	15,30 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan		PAGENTAN 2			2.225.000,00	0	0,00%

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	PUNGGELEN 2			12.459.900,00	6.300.000	50,56 %	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	RAKIT 2			1.600.000,00	97.500	6,09%	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	MADUKARA 2			450.000,00	0	0,00%	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				7.000.000,00	0	0,00%	
		11	Pengelolaan Pelayanan	DINAS KESEHATAN			177.061.409,00	83.702.409,0	47,27 %	

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kesehatan penderita Tuberkulosis					0		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Tuberkulosis	BATUR 1			62.256.909	48.441.909	77,81 %	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Tuberkulosis	BATUR 2			1.100.000,00	0	0,00%	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Tuberkulosis	BAWANG 1			7.220.000,00	0	0,00%	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Tuberkulosis	KALIBENING			6.000.000,00	4.100.000	68,33 %	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Tuberkulosis	KARANGKOB AR			500.000	0	0,00%	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Tuberkulosis	MANDIRAJA 2			500.000,00	0	0,00%	
			Pengelolaan	PUNGGELEN				0	0,00%	

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pelayanan Kesehatan penderita Tuberkulosis	1				6.100.000,00		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Tuberkulosis	PWJ KLAMPOK 1				1.400.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Tuberkulosis	PWJ KLAMPOK 2				400.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Tuberkulosis	RAKIT 1				6.020.500,00	1.740.500	28,91 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Tuberkulosis	SIGALUH 2				800.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Tuberkulosis	SUSUKAN 1				4.900.000,00	3.110.000	63,47 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Tuberkulosis	SUSUKAN 2				1.775.400,00	50.000	2,82%

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Tuberkulosis		WANADADI 1			16.896.600,00	1.480.000	8,76%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Tuberkulosis		WANADADI 2			1.850.000,00	1.750.000	94,59 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Tuberkulosis		WANAYASA 2			240.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Tuberkulosis		BANJARNEG ARA 1			240.000,00	140.000	58,33 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Tuberkulosis		BANJARNEG ARA 2			6.500.000,00	3.740.000	57,54 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Tuberkulosis		BAWANG 2			3.000.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita		PANDANARU M			7.400.000,00	7.400.000	100,00 %

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tuberkulosis							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Tuberkulosis	MADUKARA 2			1.000.000,00	400.000	40,00 %	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Tuberkulosis	PEJAWARAN			2.250.000,00	0	0,00%	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Tuberkulosis	PURWANEGA RA 1			32.522.000,00	11.350.000	34,90 %	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Tuberkulosis	SIGALUH 1			1.390.000,00	0	0,00%	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Tuberkulosis				4.800.000,00	0	0,00%	
		12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	DINAS KESEHATAN			193.688.694,00	161.527.621,00	83,40 %	

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		BANJARMAN GU 1			169.708.694	157.402.621	92,75 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		BATUR 2			250.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		KALIBENING			4.100.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		KARANGKOB AR			500.000	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan	1	PUNGGELEN			1.000.000,00	0	0,00%

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	SIGALUH 2				6.100.000,00	1.800.000	29,51 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	SUSUKAN 1				1.075.000,00	175.000	16,28 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	SUSUKAN 2				480.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	WANADADI 1				480.000,00	0	0,00%

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dengan Risiko Terinfeksi HIV							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		WANAYASA 2			2.310.000,00	2.150.000	93,07 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		BANJARNEG ARA 1			120.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		BANJARNEG ARA 2			600.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko		RAKIT 2			4.515.000,00	0	0,00%

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Terinfeksi HIV							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		MADUKARA 2			500.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		PURWANEGA RA 1			600.000,00	0	0,00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					1.350.000,00	0	0,00%
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				9.885.259.000	9.034.851.950	95%
		2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				5.264.858.000	5.206.763.550	66%
1.04	Bidang Urusan Perumahan Rakyat									
		1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-		45.000.000	44.780.000	0
		2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-		-	-	0
1.05	Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							788,080,000	657,100,950	83.38%
		1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP				-	-	0

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana								
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Penanggulangan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	26.930.000	25.430.000	94,43%	
	3	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	151.817.500	149.349.300	98,37%	
						Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				
						Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
	4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	124.182.000	94.850.000	76,37%	
							50.000.000	760.600	1.52%	
							221.150.000	214.850.000	97.15%	

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran					373,280,000	364,714,350	97.71%
			Dinas Pemadam Kebakaran		Program peningkatan kesiaamanan dan pencegahan bahaya kebakaran	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	373,280,000	364,714,350	97.71%	
1.06	Bidang Sosial							724.645.500	675.453.097	92.80%
			Dinas Sosial			Penyediaan Permakanan	69.400.000	67.962.000	97.93%	
						Penyediaan Sandang	17.824.500	17.744.500	99.55%	
		2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti			Penyediaan Alat Bantu	550.247.200	501.858.787	91,21%	
		3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	250.900	250.900	100%	
		4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti			Pemberian Bimbingan Fisik, mental, Spiritual dan Sosial	1.875.000	1.875.000	100%	
			Dinas Sosial			Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, LUT, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.875.000	1.875.000	100%	
						Fasilitasi Pembuatan NIK, Akta lahir, Surat Nikah dan KIA	926.300	926.300	100%	

No	BIDANG URUSAN	No	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	250.900	250.900	100%	
						Pemberian layanan Data dan Pengaduan	178.300	178.300	100%	
						Pemberian Layanan Kedaruratan	214.600	214.600	100%	
						Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	710.900	710.900	100%	

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Penerapan SPM Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 sebagai amanat perundang-undangan bermuara pada terwujudnya kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Secara umum, penerapan SPM Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat beberapa target yang belum dapat terealisasi secara optimal.

Laporan penerapan SPM tentunya dapat menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan evaluasi atas layanan pemenuhan kebutuhan dasar kepada masyarakat. Beberapa hal yang perlu menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya antara lain:

1. Perlu disusun peraturan kepala daerah yang mengatur pedoman penerapan SPM sehingga dapat menjadi acuan bagi perangkat daerah pengampu SPM dalam melaksanakan penerapan SPM.
2. Perlunya integrasi penerapan SPM dimulai dari tahap perencanaan program dan kegiatan hingga penyusunan anggaran sehingga penerapan SPM tidak hanya berorientasi pada realisasi capaian saja namun lebih jauh lagi dapat menjamin mutu pelayanan dasar yang diberikan.

Dengan mengacu pada hasil capaian dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 ini diharapkan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 dapat lebih optimal sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang lebih Baik.